BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Publik relations atau Humas merupakan salah satu komponen penting bagi pencapaian visi, misi, atau tujuan dari sebuah organisasi, baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* ataupun *non profit*, termasuk di dalamnya Humas dalam departemen, institusi, ataupun lembaga milik pemerintah serta Dinas Kehutanan sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah. Humas berperan dalam mengelola tindakan dan menjalin komunikasi timbal-balik serta menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi tersebut dengan publik-publiknya, sehingga program-program yang dijalankan mendapat dukungan dan sesuai dengan kebutuhan publik serta tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Saat ini Indonesia kehilangan sekitar dua juta hektar hutan setiap tahun, meningkat dari satu juta hektar per tahun pada tahun 1980-an. Luas tutupan hutan mengalami penurunan dari 162 juta hektar pada tahun 1950 menjadi 98 juta hektar pada tahun 2000. Hutan-hutan dataran rendah Indonesia, yang paling kaya persediaan kayu dan keanekaragaman hayatinya, hampir seluruhnya lenyap di Sulawesi, dan akan lenyap di Sumatera pada tahun 2005 dan di Kalimantan pada tahun 2010. Padahal hutan-hutan Indonesia merupakan hutan yang terkaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3 persen dari luas daratan permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada di

spesies mamalia, dan 16 persen species burung. Namun, potret keadaan Hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial ini ternyata semakin buram. Kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia. Laju deforestasi yang sedang terjadi tidak kurang dari 2 juta hektar per tahun, atau dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 1980-an " Yang menjadi penyebab utama deforestasi hutan-hutan Indonesia yang terluas di Asia - dan yang terluas ketiga di dunia adalah korupsi, anarki, penebangan liar,pencurian kayu, ketidakstabilan politik, dan ekspansi industri kehutanan yang berlebihan.[1]

Gambaran tentang keadaan hutan di Indonesia tersebut sangatlah memprihatinkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari gundulnya hutan atau penebangan liar adalah bencana alam, dan dalam setiap tahunnya kejadian ini sering kita jumpai, baik yang kita ketahui lewat media massa ataupun lewat cerita langsung dari masyarakat yang mengalami dan melihat langsung hal tersebut. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Bohorok, Sumatera Utara, penggundulan hutan dan penebangan liar tersebut telah membawa daerah tersebut terkena bencana yang mengakibatkan korban materiil, bahkan korban nyawa manusia. Padahal disisi lain jika disadari, hutan dan SDA yang ada di dalamnya jika dikelola dan dilindungi secara baik justru akan menjadi aset berharga dan pemasukan bagi daerah sehingga dapat membantu mensejahterahkan masyarakat itu sendiri.

Demikian pula halnya di Kabupaten Muna, SDA yang dimiliki dalam hal ini kayu jati perlu dilindungi secara serius oleh pemerintah yang terkait dari penebang-penebang liar. Karena di Kabupaten Muna dalam 5-10 terakhir banyak sekali ditemukan adanya pencurian dan penebangan kayu jati oleh masyarakat sekitar, seperti kutipan surat kabar Suara Pembaharuan berikut ini:

"Pencurian kayu jati dan kasus perombakan hutan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), semakin berani. Salah satu bukti keberanian para pencuri kayu jati itu dengan merusak kantor kehutanan Kecamatan Tiworo kepulauan (Tikep). Walaupun pihak pemerintah daerah dan pihak keamanan setempat telah memperkuat pengawasan di lapangan, namun oknum pencuri kayu itu tidak juga takut. Di samping itu dua truk pengangkut kayu jati ilegal telah diamankan di halaman rumah jabatan bupati dan di halaman kantor KPH Muna. Selain 8 kasus perncurian kayu jati terdapat pula 15 kasus pencurian selama tahun 1996/1997. Dari 15 kasus pencurian kayu jati itu, barang bukti yang diperoleh berupa 8.778 lembar kayu jati, 1 kampak, 1 buah pacul, 1 parang dan 2 truk.".[2]

Sementara itu harian Media Indonesia mengungkapkan bahwa dari operasi Wanalaga yang dilakukan oleh Polres Muna di tahun 2001, telah di tangkap 25 oknum pencuri dan penebang liar kayu jati.[3] Bukti-bukti tentang penebangan dan pencurian kayu jati di atas hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada di lapangan, sebab masih banyak oknum-oknum lainnya dan kasus-kasus lainnya yang tidak terdeteksi oleh pihak-pihak yang berwajib.

Adanya bukti nyata tentang pencurian dan penebangan kayu jati di atas tentu saja harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sebagai lembaga yang berwenang dan mempunyai peranan penting dalam hal melindungi hutan dan SDA. Dinas Kehutanan dituntut secepat mungkin melakukan upaya pencegahan dan merancang program-program yang

[2] Harian Suara Pembaruan, 15- Februari-1997.
[3] Harian Media Indonesia, 7-Mei-2002

efektif dan efisien untuk mengatasi hal tersebut, hal ini dikarenakan penebangan yang dilakukan di Kabupaten Muna saat ini dari waktu ke waktu semakin meningkat dan hutan-hutan jati tersebut sedikit demi sedikit mulai habis ditebang dan bahaya-bahaya yang ditimbulkanpun mulai nampak terlihat, yaitu adanya banjir kecil-kecilan pada wilayah-wilayah tertentu dan hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan semakin merusak lingkungan dan dapat menimbulkan bencana yang lebih besar lagi.

Sementara itu saat ini banyak pula tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM dan masyarakat yang peduli terhadap hutan jati agar penebangan liar tersebut segera diberantas. Mereka menuntut agar permasalahan ini sesegera mungkin dicari solusi dan diadakan program-program serta kepastian hukum terhadap oknum penebang liar tersebut, sehingga dampak bahaya yang timbulkan tidak terjadi dan aset tersebut dapat dilindungi dan dimanfaaatkan untuk mensejahterakan masyarakat Muna.

Dalam mengatasi permasalahan itulah, komunitas atau masyarakat sekitar hutan adalah salah satu faktor yang paling penting untuk menjadi sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam mengatasi hal tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar kawasan hutan jati adalah salah satu yang menjadi pelaku dari penebangan liar tersebut. Karena itu peranan Humas Dinas Kehutanan sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama terhadap masyarakat sekitarnya, sebab humaslah yang bertugas untuk melakukan pola-pola komunikasi yang efektif dan efisien serta menjalin hubungan baik dengan [illegible]

menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

Di samping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian dari Humas Dinas Kehutanan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penebangan tersebut adalah informasi tentang keuntungan aset kayu jati yang dimiliki Kabupaten Muna dan bahaya dari adanya penebangan liar yang disampaikan belum secara jelas dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Dalam hal ini strategi dan komunikasi persuasif yang dijalankan belum efektif dan belum mampu meyakinkan masyarakat sekitar hutan jati secara keseluruhan. Karena itu Humas perlu pula bekerjasama dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat setempat guna membantu menyampaikan informasi dan program-program Dinas Kehutanan serta meyakinkan mereka tentang pentingnya mengatasi penebangan liar tersebut. Sebab para tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok penting pada masyarakat setempatlah yang mengetahui secara pasti tentang bagaimana bentuk komunikasi yang efektif dan efisien yang mampu dipahami oleh masyarakat setempat. Humas juga harus menjalin komunikasi dua arah dengan tidak hanya berperan memberikan informasi dan sosialisasi tentang program-program yang hendak dilaksanakan Dinas Kehutanan tetapi juga mencari tahu permasalahan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat sekitar hutan dan apa yang diharapkan oleh mereka terhadap permasalahan tersebut. Dengan menampung aspirasi, saran, kritik dan pendapat masyarakat tersebut dapat menjadi masukan bagi Dinas Kehutanan dalam menentuan kebijakan, menyusun program dan mencari strategi

Oleh karena itu Humas perlu terlebih dahulu harus membentuk iklim yang kondusif di dalam tubuh Dinas Kehutanan itu sendiri lewat adanya komunikasi yang baik di dalamnya. Hal ini dibutuhkan untuk membentuk sikap yang professional dan kerjasama yang baik sesama pegawai Dinas Kehutanan baik dalam merancang ataupun menjalankan program-program yang efektif mengatasi masalah tersebut. Sikap professional, kerjasama yang baik serta kesungguhan Dinas Kehutanan dalam mengatasi penebangan liar ini akan menjadi penilaian positif dari masyarakat sehingga program yang telah direncanakan tersebut mendapat dukungan dari mereka sehingga dapat dijalankan dan terlaksana dengan baik.

Menjalin kerjasama dengan publik eksternal lainnya juga harus dilakukan oleh Humas Dinas Kehutanan, karena dalam kasus penebangan liar ini, Dinas Kehutanan tidak bisa melakukannya secara sendirian tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang terkait yaitu diantaranya adalah aparat kepolisian, karena merekalah yang membantu untuk mengawasi adanya penebangan liar tersebut dan menangkap mereka jika menemukan adanya oknum penebang liar tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukannya lagi. Demikian pula dengan pers kerjasama dengan mereka membantu Dinas Kehutanan dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat dan dengan pemberitaannya tentang adanya penebang liar yang sangat membahayakan lingkungan tersebut, masyarakat tergugah untuk sama-sama

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah *"Bagaimanakah kegiatan community relations oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dalam mengatasi penebangan liar?"*

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan dan pelaksanaan *community relations* Dinas Kehutanan dalam mengatasi penebangan liar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Kehutanan Muna dalam pelaksanaan kegiatan *community relations* untuk mengatasi penebangan liar.

D. Kerangka teori

1. Humas

Keberadaan sebuah organisasi pada dasarnya memiliki hubungan dengan lingkungan atau masyarakat setempat dimana organisasi itu berada. Humas sebagai bagian dari organisasi tentu saja memiliki peran esensial untuk membantu organisasi dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan dan keadaan lingkungan atau masyarakat setempat yang menjadi sasaran kegiatannya.

Adapun tentang definisi dari Humas, *The British Institute of Public relations* mendefinisikan Humas/*Public relations* sebagai berikut:[4]

"*Public relations* adalah upaya yang sungguh-sungguh, terencana, dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi dengan publik."

Dalam pada itu *Frank Jefkins* dalam bukunya *Public relations* menyatakan :

"*Public relations* adalah segala sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian." [5]

Hal senada diungkapkan pula oleh A.W Wijaya yang mengartikan *public relations* sebagai suatu kegiatan untuk menanamkan pengertian guna memperoleh *good will*, kerjasama dan kepercayaan yang pada gilirannya mendapat dukungan dari pihak lain.[6]

Dengan demikian maka Humas merupakan upaya untuk menciptakan, membina, dan menanamkan pengertian guna memperoleh *good will*, kerjasama dan kepercayaan dari publik, lembaga atau organisasi melalui kegiatannya untuk mendapatkan dukungan dari lembaganya dan publiknya.

Pengertian-pengertian di atas dilengkapi oleh pendapat *Deny Griswold* yang mendefinisikan Humas sebagai fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur atas dasar kepentingan publik, merencanakan dan menjalankan kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima oleh publik.[7]

Dari pengertian-pengertian tentang Humas tersebut dapat dirumuskan pengertian secara lebih sederhana yaitu hubungan masyarakat atau Humas adalah suatu kegiatan untuk membina dan menjalin hubungan yang harmonis antara

---

[5] F. Rachmadi, *Public Relations dalam Teori dan Praktek*, P.T Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 19.

[6] A.W. Wijaya, *Komunikasi (Komunikasi dan humas)*,P.T Bina Aksara, Jakarta, !986, hal. 55.

lembaga/organisasi yang di wakilinya dengan publik untuk memperoleh opini, persepsi dan citra yang positif dan *favourable* mengenai organisasi/lembaganya melalui aktivitas dan kegiatan yang dibuat dan dijalankannya dengan cara komunikasi dua arah secara timbal balik. Serta membantu organisasi memperoleh penyesuaian yang menguntungkan, mendukung fungsi dan tujuan manajemen dalam meningkatkan pembinaan kerjasama untuk pemenuhan kepentingan bersama.

Pengertian di atas juga mengindikasikan bahwa Humas secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi, artinya Humas bukan merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan. Jadi fungsi Humas melekat pada manajemen organisasi, yaitu membantu menciptakan dan memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan dan kerjasama suatu organisasi dengan publiknya serta ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen dan juga bagaimana Humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Dalam hal ini Humas tidak hanya menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan organisasi, tetapi juga menganalisa opini publik dan aspirasi, serta keinginan publiknya sebagai bahan pertimbangan organisasi dalam menyusun dan memperbaiki program dan kegiatannya.

Oleh karena itu Humas dalam sebuah organisasi mempunyai banyak tugas untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Adapun dalam menjalankan tugas

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Dalam hal ini Humas melakukan fungsi komunikasi dengan menyebarkan informasi di satu pihak dan di pihak lain melakukan komunikasi langsung dalam bentuk penyampaian pesan
2. Sebagai *back up manajemen*, artinya sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi. Hal ini dilakukan dengan melalui tahapan POAC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggiatan), *Controling* (pengawasan).
3. Membentuk *corporate image*, yaitu menciptakan citra organisasi atau lembaga yang bertujuan akhir dari suatu aktivitas program kampanye Humas, baik untuk keperluan publikasi ataupun promosi.

Humas/PR bertujuan untuk menjalin dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkaitan, baik itu publik internal ataupun publik eksternal. Tujuan *internal public relations* adalah mencapai pegawai dan karyawan yang mempunyai gairah kerja, sedang tujuan *eksternal publik relations* adalah mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar organisasi sehingga terbentuk opini publik yang menguntungkan organisasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka Humas dalam kegiatannya perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi secara dua arah timbal balik. Adanya kegiatan yang terdiri dari penyebaran dan penerangan informasi, melakukan persuasi untuk membujuk masyarakat dan mangkaji opini publik

2. Adanya usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan dari organisasi terhadap masyarakat.
3. Adanya usaha penyesuaian kebijaksanaan organisasi sesuai kebutuhan masyarakat dan pemenuhan kepentingan bersama.
4. Mengusahakan terjalinnya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya.

Kegiatan-kegiatan Humas di atas akan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan serta manfaaat bagi masyarakat sekitar hutan. Olehnya itu maka kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan tepat dan terencana sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan Humas tersebut maka antara organisasi, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan masyarakat sekitar hutan yang menjadi sasaran kegiatan mendapatkan keuntungan. Di satu sisi publik/masyarakat mempunyai manfaat dari kebijaksanaan yang diberlakukan organisasi yaitu terhindar dari bahaya bencana alam dan dengan aset kayu jati yang dapat membantu mensejahterahkan masyarakat. Sedang bagi organisasi mendapat keuntungan dari penerimaan publik dan kerjasama dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan sehingga memudahkan bagi tercapainya tujuan organisasi serta adanya tanggapan positif dari semua pihak.

2. Eksternal Public relations

Dalam menjalankan tugasnya, Humas tentu saja akan melakukan dan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain atau publik, baik itu publik

akan dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama dengan publik-publik tersebut.

Sebelum memahami tentang publik eksternal maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang definisi publik. Pengertian publik sendiri adalah sekelompok orang-orang yang sama-sama terikat oleh suatu kepentingan yang sama dan mempunyai perasaan yang sama. Sedang definisi lain mengatakan publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik selain dapat merupakan group kecil yang terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit, juga dapat merupakan sekelompok yang besar. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung.[8]

Publik tidak hanya berarti semacam badan atau lembaga eksternal, akan tetapi mencakup juga pegawai-pegawai, penopang usaha, asosiasi-asosiasi dan rekanan-rekanan, media, jaringan perdagangan industri dan peyandang-penyandang dana, disamping juga kelompok-kelompok berpengaruh.[9]

Adapun yang dimaksud *eksternal publik relations* adalah salah satu bentuk kegiatan *public relations* yang ditujukan kepada publik yang berada di luar organisasi/perusahaan yang bertujuan untuk mencari serta memperoleh dukungan dan partisipasi dari publik yang berada di luar organisasi/perusahaan tersebut.[10]

---

[8] Oemi Abdurrahman, *Dasar-dasar Public Relations*, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung, hal 28.
[9] Tony Greener, *Kiat Sukses Public Relations dan Pembentukkan Citra*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 4.

Untuk mengetahui lebih jelasnya yang dimaksud dengan publik ekstern disini adalah orang luar atau publik umum (masyarakat) di mana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau informasi demi tumbuhnya *good will* dari mereka. Sedang dalam kegiatan *publik relations* pemerintah, atau penerangan pemerintah (*government information*), maka publik atau khalayak ekstern adalah rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya fungsi dari kegiatan *public relations*/Humas yang berbentuk eksternal, maka Humas secara garis besarnya harus dapat merubah pendapat dan pandangan publik di luar instansi/perusahaan dan sekaligus mempengaruhi publik tersebut untuk mendukung kebijaksanaan dan program yang dilakukan instansi/perusahaan. Sehingga akan terbentuk suatu bentuk pendapat yang *favourable* terhadap organisasi/perusahaan yang diwakili oleh Humas/*public relations.* Adapun pengertian dukungan publik disini dibatasi kepada pengertian:[11]

1. Memperluas langganan atau pemasaran.
2. Memperkenalkan sesuatu jenis hasil produksi atau gagasan dan kebijaksanaan organisasi yang berguna bagi publik dalam arti luas.
3. Mencari dan mengembangkan modal.
4. Memperbaiki citra perusahaan/organisasi terhadap pendapat masyarakat luas, guna mendapatkan opini publik yang positif.

Dengan adanya aktivitas atau *kegiatan Eksternal public relations* ini akan turut menentukan keberhasilan dan eksistensi dari suatu lembaga/organisasi.

gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan organisasi ini harus dapat dilakukan secara baik. Di mana dengan tumbuhnya sikap dan *image* masyarakat yang positif ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan mempengaruhi dukungan serta partisipasi publik dalam menjalankan program dan kebijaksanaan yang sudah ditentukan.

Adapun hubungan yang selalu harus dibina dan dipelihara dengan publik eksternal ini antara lain adalah hubungan dengan:[12]

1. *Press relations*

   Mengatur dan memelihara hubungan dengan pers dalam arti yang luas yaitu semua media massa mulai dari surat kabar, majalah, radio, televisi, dan dengan pers itu sendiri. Hal ini berperan untuk memperlancar publikasi dan mencapai publik yang tersebar di wilayah yang sangat luas.

2. *Government relations*

   Mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, termasuk lambaga atau instansi resmi yang berhubungan dengan kegiatan organisasi/perusahaan.

3. *Community relations*

   Mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat termasuk dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

4. *Supplier relations*

---

[12] [illegible] 1986, hal 74-75

Mengatur dan memelihara hubungan dengan para pemborong, kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar.

5. *Customer relations*

   Mengatur dan memelihara hubungan dengan para pelanggan.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa salah satu tujuan *eksternal public relations* adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar lembaga/organisasi sehingga terbentuk opini publik yang *favourable* terhadap organisasi tersebut. Olehnya itu tugas penting *eksternal public relations* adalah mengadakan komunikasi yang efektif, yang sifatnya informatif dan persuasif yang ditujukan kepada publik di luar lembaga/organisasi itu.

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam *eksternal public relations* atas dasar memperoleh dukungan, pengertian, dan kepercayaan dari publik luar (*eksternal public*), serta untuk menciptakan kesediaan kerjasama dari publik, adalah:[13]

1. Menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan, terhadap para pegawai dan metode yang digunakan.
2. Memberi advice dan counsel pada pimpinan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan *public relations*/Humas mengenai perbaikan-perbaikan, kegiatan-kegiatan, dan lain-lain.
3. Memberikan penerangan-penerangan yang obyektif, agar publik tetap

4. Menyusun staf yang efektif untuk melakukan hal-hal di atas.

Dalam menjalankan tugas untuk membina hubungan baik dengan *eksternal public relations* tentu akan membutuhkan adanya komunikasi di dalamnya. Adapun komunikasi dengan eksternal publik ini dapat diselenggarakan antara lain dengan:[14]

1. *Personal contact*

   Unsur yang penting dalan hubungan ini adalah perlakuan terhadap individu-individu yang berhubungan dengan instansi/organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah reaksi dari tiap individu dalam masyarakat terhadap para pegawai dan karyawan tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para pegawai/karyawan yang berhubungan langsung dengan publik harus selalu bersedia untuk mendengarkan apa yang dikatakan dan ditanyakan oleh publik baik mengenai program ataupun dalam hal melayani masyarakat.

2. *Press release*

   Hal ini digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai kebijaksanaan, hasil rapat, kejadian-kejadian, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi. Dan juga yang perlu diperhatikan juga adalah soal-soal teknis penyusunan *press release*.

3. *Press relations*

   Penting sekali dalam Humas/PR bagi seorang *Public relations officer* untuk berkomunikasi dan mempunyai hubungan yang baik dengan

pimpinan-pimpinan dari media massa. Hal ini bisa membawa dampak positif bagi organisasi dalam penberitaan yang akan dilakukan oleh media massa.

4. *Press conference dan press briefings*

   Diselenggarakan jika ada peristiwa-peristiwa penting dalam organisasi, bisa datang dari inisiatif organisasi sendiri atau permintaan dari pers yang menggangga penting tentang peristiwa ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh organisasi.

5. *Publicity*

   Memberitakan hal-hal yang ada dalam organisasi mengenai program atau rencana yang dilakukan yang ditulis dalam surat kabar, majalah, atau melalui radio dan televisi dengan penuh "***human interest***" dan menarik perhatian publik.

6. *Radio dan televisi*

   Radio dan televisi merupakan saluran penyampaian informasi dan komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau publik yang luas dan menarik perhatian publik. Karena itu lewat media ini organisasi dapat menyampaikan program dan kebijaksanaan yang dilakukannya.

7. Media komunikasi dan informasi lainnya

   Selain menggunakan media di atas, masih banyak cara-cara lain untuk menyebarluaskan informasi dan menjalin hubungan dengan publik. Di antaranya dengan menggunakan media komunikasi tradisional yang ada di daerah tersebut, melakukan kunjungan-kunjungan, sambutan-sambutan,

penyuluhan, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan media-media di atas tidak lepas harus memikirkan tentang efektivitasnya. Oleh karena itu para pejabat humas (PRO) mengetahui tentang media komunikasi tadi sehingga dapat memilih mana yang paling tepat untuk masyarakat setempat.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa perencanaan media dan media massa dalam menjalin komunikasi dan hubungan dengan publik eksternal serta masyarakat sekitar memegang peranan yang penting dalam mensukseskan peran humas, lebih-lebih jika dilihat populasi jangkauan hubungan masyarakat yang sangat luas dan banyak jumlahnya. Setiap media mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing, karena itu humas harus menggunakan media tersebut secara terpadu dan saling melengkapi, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat, komunikasi dan hubungan yang dibangun dapat terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan dan partisipasi dari publik.

3. Community relations

Dalam upaya untuk mengatasi adanya penebangan liar di Kabupaten Muna, menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan komunitas/masyarakat sekitar hutan juga mempunyai peranan penting dalam ikut mendukung upaya mengatasi permasalahan tersebut. Sebab para penebang liar salah satunya datangnya dari masyarakat di kawasan hutan itu sendiri. Oleh karena itu, Humas Dinas Kehutanan harus menjaga hubungan (*community relations*) yang harmonis

dan bekerjasama dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan.

Definisi komunitas sendiri adalah sekelompok individu yang bertempat yang sama, berpemerintah sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun temurun.[15] Di mana orang-orang yang hidup dalam komunitas yang sama pasti memiliki ketergantungan satu dengan lainnya.

Sementara itu *Center* dan *Jackson* mendefinisikan komunitas sebagai suatu organisasi sosial di mana di dalamnya terdapat interaksi antara para penduduk dan dengan organisasi-organisasi yang teridentifikasi.[16] Jadi komunitas tidak hanya sekedar merupakan sekumpulan orang-orang yang tinggal bersama, tetapi ada interaksi didalamnya, juga terhadap organisasi-organisasi yang ada di sekitarnya. Sedang *Wilbur J. Peak* dalam karyanya "*Community relations*", yang dimuat dalam *Lesly's public relations Handbook*, mendefinisikan hubungan komunitas sebagai berikut:[17]

> "Hubungan komunitas, merupakan salah satu fungsi *public relations*, merupakan partisipasi suatu lembaga yang terencana, aktif dan terus menerus dengan dan didalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga dan komunitas."

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas berorientasi kepada kegiatan (*action oriented*), yakni pola hubungan yang dilakukan oleh lembaga yang diwakili oleh Humas/PR yang bersifat partisipatif.

---

[15] H. Frazier Moore, *Hubungan Masyarakat Prinsip, Kasus dan Masalah*, P.T Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal 65.
[16] Allen H. Center & Patrick Jackson, Public Relations Practices, Managerial Case Studies & Problems, New Jersey, Prentice Hall, 1995, hal 81.
[17] Wilbur J. Peak, Phillip Lesley, Lesleys Handbook of Public Relations and Communication. Edisi ke4, Illinois, Probus Publishing Company, 1991, hal 117.

Dengan demikian maka keuntungan tidak hanya didapat oleh organisasi, tetapi juga oleh komunitas dan masyarakat setempat serta lingkungannya.

Di dalam upaya membangun hubungan yang baik dengan komunitas, beberapa hal harus dimiliki organisasi, yaitu:

1. Adanya kesadaran atau keinginan baik (*good will*) dari pihak manajemen untuk menempatkan hubungan komunitas sebagai bagian penting dalam menjalankan aktivitas organisasi.
2. Ada perencanaan yang sifatnya berkala, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengintegrasikan hubungan komunitas dalam manajemen organisasi secara terpadu.
3. Ada divisi atau departemen yang secara khusus menangani kegiatan-kegiatan hubungan komunitas.
4. Ada teknik-teknik tertentu dalam kegiatan hubungan komunitas yang merupakan ujung tombak dari hubungan komunitas sehingga hubungan komunitas dapat terlaksana dengan lancar.

Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan komunitas, maka Humas sebagai wakil dari organisasi dalam melakukan komunikasi dengan mereka perlu menyusun kegiatan-kegiatan atau program-program hubungan komunitas dengan memperhatikan tiga hal, yaitu Pertama, organisasi harus mengetahui tentang struktur sebuah komunitas, apakah komunitas itu homogen atau heterogen. Dalam hal ini struktur kepemimpinan dalam komunitas tersebut, baik formal ataupun informal, struktur nilai-nilai yang berlaku serta struktur komunikasi yang ada. Kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan komunitas

Dalam hal ini perlu dipahami masalah-masalah khusus, keadaan ekonomi, institusi/lembaga politik yang ada, serta sumber daya khas dari komunitas, sehingga bisa dipergunakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi komunitas yang ada. Ketiga, berkaitan dengan pengetahuan dan sikap komunitas terhadap organisasi. Dalam hal ini yang perlu dipahami adalah sejauh mana komunitas mengetahui tentang organisasi, produk organisasi, prosedur kerja, sejauhmana komunitas mengetahui tentang program, kegiatan, dan kebijaksanaan organisasi, dan juga bagaimana sikap komunitas terhadap hal-hal tersebut dan apa harapan mereka terhadap organisasi.

Dalam menjalankan kegiatan untuk membina hubungan komunitas ini haruslah bentuk kegiatan yang dilakukan tidak secara sembarangan. Tetapi harus dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang dan pelaksanaannya, harus dilakukan secara aktif dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu hubungan komunitas yang baik. Menurut *Center* dan *Jackson* ada 3 level strategis dalam hubungan komunitas yang perlu dilakukan oleh organisasi/Humas, yaitu:[18]

1. *Defensive* (bertahan, yaitu menjaga dari tindakan negatif atau kelalaian yang bisa memperburuk pandangan masyarakat terhadap organisasi.
2. *Proactive* (proaktif), yaitu menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, sehingga masyarakat memberi penilaian yang positif pula.
3. *Maintenance* (memelihara), yaitu dengan menemukan cara untuk menjaga hubungan sehingga hubungan harmonis tersebut dapat terus berjalan.

[18] Allen H. Center & Patrick Jackson, Op.cit., hal. 84.

Ketiga level strategis di atas menjadi salah satu pedoman Humas dalam menjalankan aktivitas dan strategi yang digunakan untuk menghasilkan hubungan komunitas yang baik. Karena itu Humas harus selalu menjaga segala tindakan, ikut berperan aktif dalam kegiatan yang bersifat positif, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun oleh komunitas serta selalu berusaha mencari jalan keluar dan cara yang efektif agar hubungan dengan komunitas dapat terus terjaga tetap berjalan dengan harmonis. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mendapat dukungan mereka dan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi dari ketiga level strategis di atas, haruslah ada salah satunya yang menjadi prioritas utama di dalam membina hubungan dengan komunitas tersebut. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masyarakat serta tujuan dari organisasi itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan strategi dalam menjalankan program dan kegiatan.

Adapun dalam membina hubungan komunitas tersebut komunikasi yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Mengundang masyarakat jika organisasi melakukan kegiatan atau mengadakan acara. Hal ini berkaitan dengan pembentukkan citra positif masyarakat terhadap organisasi yang selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan ataupun aktivitasnya.
2. Pidato umum, yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dihadapan kumpulan masyarakat setempat, serta organisasi-organisasi yang ada di

organisasi, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat ataupun program umum dari organisasi.

3. Pertemuan dengan para tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok penting masyarakat untuk melakukan *sharing* pendapat dan meningkatkan pengertian yang lebih baik mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.

Dalam menjalankan program-program terhadap hubungan komunitas, tentu saja mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan penting tersebut adalah sebagai berikut:[19]

1. Memberi informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan, kegiatan dan masalah yang dihadapi serta menyampaikan segalah hal yang dilakukan organisasi/perusahaan.
2. Memberi informasi kepada para karyawan yang berhubungan dengan organisasi/perusahaan agar diteruskan kepada teman-temannya dan tetangganya dalam komunikasi tersebut.
3. Menjawab kritik dan memukul balik tekanan kelompok setempat yang salah paham terhadap organisasi/perusahaan.
4. Menjadikan perusahaan/organisasi sebagai faktor penting dalam kehidupan komunitas melalui bantuan kepada lembaga-lembaga setempat dan turut serta dalam masalah lingkungan.
5. Saling berkenalan dengan orang-orang dalam komunitas dengan mengundang kelompok dan pemuka pendapat setempat untuk bertemu

[19] H. Frazier Moore, Op.cit,. hal 76-77.

dengan para pelaksana dari organisasi/perusahaan dan melihat bagaimana operasionalisasinya.

6. Bekerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi dengan menyediakan bahan-bahan pendidikan dan melengkapi sarana dan fasilitas latihan.
7. Membantu peternakan dan pertanian di tempat-tempat kesejahteraan komunitasnya bergantung pada kemakmuran sawah atau ladang sekitarnya.
8. Meningkatkan kesehatan komunitas dengan mendukung program-program kesehatan setempat.
9. Menyumbang kepada program pemberantasan kenalan remaja dan untuk mendapatkan itikad baik dari remaja di dalam komunitas itu.
10. Menunjukkan kepada warga komunitas bahwa organisasi/perusahaan merupakan warga dan majikan yang baik.
11. Menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemuka komunitas dalam semangat kebersamaan yang tinggi.

Dalam melakukan kegiatan kehumasan termasuk kegiatan *community relations* harus melalui beberapa tahapan atau proses sehingga menjadi suatu kegiatan yang menguntungkan bagi organisasi dan masyarakat itu sendiri. Menurut Onong Uchjana kegiatan-kegiatan *community relations* ataupun kehumasan berlangsung menurut beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:[20]

[20] Oemi Abderrahman, Op.cit hal 98-106

1. Penelitian

Penelitian mencakup kegiatan *data collection* (pengumpulan data), dan *fact finding* (pengkajian data). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan jalan membuat perbandingan, pertimbangan, dan penilaian yang kemudian akan dipilih, diklasifikasikan, dipisah-pisahkan dan dikelompokkan dan kemudian disusun untuk digunakan pada tahap perencanaan.

2. Perencanaan

Tahap perencanaan ini diperlukan pemikiran secara matang, karena pada tahap ini yang akan menentukkan keberhasilan pada tahap operasionalnya. Perencanaan mengharuskan seorang seorang praktisi kehumasan melihat jauh ke depan, ke dalam dalam arti kemampuan diri dan organisasi serta sekelilingnya.

3. Penggiatan

Tahap ini adalah merupakan tahap pelaksanaan secara aktif dari rencana yang sudah disusun berdasarkan data faktual. Pada tahap ini juga digunakan berbagai jenis, bentuk dan teknik komunikasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Serta membutuhkan mekanisme kerja yang mapan sehingga koordinasi dan singkronisasi dapat direalisasikan secara integratif.

4. Penilaian

Tahap ini berfungsi untuk mengkaji apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan menilai apakah rencana yang yang telah ada sesuai dengan realita yang ada. Selain itu penilaian juga dilakukan

pelaksanaan untuk kemudian dipakai untuk menghindari hambatan tersebut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.

4. Humas dan Community Relations Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan merupakan salah satu lembaga dari pemerintahan daerah. Karena itu Humas yang merupakan salah satu bagian yang ada dalam tubuh Dinas Kehutanan itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak berbeda jauh dengan Humas lainnya yang ada di dalam lembaga pemerintahan. Perbedaan pokok yang membedakan antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan Humas non pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan. Walaupun Humas pemerintah juga sama dalam hal kegiatan publikasi, promosi, ataupun periklanan. Tetapi Humas pemerintah lebih menekankan pada *Public services* atau demi meningkatkan kepentingan umum/masyarakat.

Kedudukan Humas pemerintah menurut *Cutlip dan Center* dalam bukunya *Effective Public Speaking*, mengatakan bahwa idealnya Humas dimasukkan dalam staf inti, langsung berada di bawah pimpinan (*decision maker*) atau *top managers*, supaya lebih mampu dalam menjalankan tugasnya.[21] Dengan posisi itu, Humas dalam lembaga pemerintahan dapat mengetahui langsung latar belakang dari sesuatu keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga, sehingga langsung mendapatkan bahan informasi untuk disampaikan untuk publik yang bersangkutan. Jadi idealnya, Humas berfungsi sebagai saluran langsung dari

lingkungan di mana proses pengambilan keputusan kepada masyarakat agar keputusan yang dibuat itu dipahami dan dimengerti.

Melalui unit atau program kerja Humas, pemerintah/lembaga yang bersangkutan dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajibannya. Menurut *John D. Millet* dalam bukunya, *Management in public service the Quest for Effective Performance,* yang artinya Humas dalam Dinas/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu[22]:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan yang terdapat dalam masyarakat.
2. Kegiatan memberikan nasehat atau sumbangan saran untuk menanggapi apa sebaiknya yang akan dilakukan instansi/lembaga pemerintahan seperti apa yang dikehendaki oleh publiknya.
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan yang diperoleh antara hubungan dengan para aparat pemerintah.
4. Memberikan informasi dan penerangan tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sedang menurut *Dimock dan Koenig*, pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi/lembaga pemerintahan, yaitu antara lain[23]:

---

[22] Rosady Ruslan, *Manajemen Humas*... Op. cit. hal 324.
[23] Ibid, hal 324.

1. Upaya memberikan informasi atau penerangan tentang pelayanan kepada masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam pelaksanaan program kegiatan organisasi/lembaga.
3. Kejujuran dan pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakn tugas dan kewajibannya masing-masing.

Beberapa poin pada masing-masing pendapat di atas mengindikasikan bahwa tugas Humas adalah berkaitan dengan menyampaikan informasi dan kebijakan tentang kegiatan dan program dari instansi bersangkutan kepada masyarakat di satu pihak dan menyerap keinginan dan aspirasi masyarakat di lain pihak. Kedua hal ini merupakan tugas humas yang berkaitan dengan tujuan Humas untuk memperoleh dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Dalam hal ini adalah untuk membina *community relations* yang baik antara masyarakat dengan instansi terkait.

Hal tersebut di atas jika kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kemudian Humas dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar hutan perlu mengetahui keinginan, aspirasi, harapan dari masyarakat terhadap adanya penebangan liar, termasuk dalam hal ini adalah cara penanganan yang cocok dengan keadaan masyarakat. Di sisi lain

liar yaitu menyampaikan informasi tentang bahaya bagi masyarakat jika penebangan liar ini terus dilakukan. Untuk memperjelas bahwa Dinas Kehutanan sebagai salah satu dari lembaga pemerintah yang ikut melindungi masyakarat perlu melakukan upaya penyadaran atas tindakan yang tidak tepat dan membahayakan masyarakat yaitu adanya penebangan liar. Untuk mendukung hal itu, maka Dinas Kehutanan perlu menjalankan kegiatan dan program yang efektif untuk mengatasi penebangan liar disesuaikan dengan keadaan masyarakat termasuk pelibatan media dan instansi/lembaga lainnya untuk mendukung hal tersebut. Hal ini bisa dapat terealisasi dengan baik jika *community relations* antara Dinas Kehutanan dengan masyakarat setempat berjalan dengan harmonis, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan program Dinas Kehutanan dan mau bekerjasama untuk mengatasi adanya penebangan liar tersebut.

Dengan adanya tugas-tugas Humas pemerintah di atas, maka keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional, termasuk Dinas Kehutanan. Karena Humas Dinas Kehutanan mempunyai tugas untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan dalam mengatasi penebangan liar yang ditujukan kepada masyarakat luas khususnya terhadap masyakarat sekitar hutan lewat kegiatan *community relations* yang efektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Humas secara garis besar mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau [illegible] kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedang kedalam wajib

menyerap reaksi, aspirasi, atau opini masyarakat tersebut diserasikan dengan kepentingan instansinya dan kepentingan masyarakat serta tujuan bersama.

Adanya peran ganda humas tersebut sangatlah menentukan bagi Humas Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar untuk mengatasi penebangan liar, karena itu pejabat Humas Dinas Kehutanan harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi. Kemampuan tersebut meliputi:

1. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan menyangkut kepentingan Dinas Kehutanan dan masyarakat setempat yang menjadi target sasarannya.
2. Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, saling mendukung bagi Dinas Kehutanan dan masyarakat dan menarik perhatian mereka.
3. Kemampuan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dan saling mempercayai dengan masyarakat, lembaga dan semua pihak yang terkait.
4. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan kelompok penting dan tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga tercipta hubungan yang baik pula dengan masyarakat sekitar.
5. Kemampuan untuk memilih media komunikasi yang efektif dan efisien yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar.

Dalam merencanakan dan menjalankan program-program Dinas Kehutanan dalam mengatasi adanya penebangan liar ini, peran dan tugas Humas Dinas Kehutanan Kabupaten Muna ini tidak akan berbeda jauh dengan fungsi dan tugas-

tugas kehumasan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Karena itu dalam menjalankan program, berkomunikasi dan membina hubungan dengan masyarakat sekitar hutan serta dalam mencapai tujuan dan menjalankan kewajiban Dinas Kehutanan itu sendiri, tugas dan peran Humas yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu tolak ukur bagi Humas Dinas Kehutanan dalam menyusun dan menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabnya.

Di samping itu tentu saja Humas Dinas Kehutanan perlu juga mengambil acuan dari pendapat-pendapat para ahli komunikasi ataupun para pengamat dan praktisi *Public Relations* tentang peran, tugas dan tanggung jawab Humas (*Public relations*), khususnya dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar hutan dalam mengatasi penebangan liar Acuan ini pula yang akan dipakai oleh Humas Dinas Kehutanan merencanakan strategi, kegiatan dan program serta pola-pola komunikasi yang efektif kepada masyarakat sekitar hutan khususnya dan publik secara umum dalam mendukung kebijaksanaan Dinas

E. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif di tujukan untuk:[24]

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
c. Membuat perbandingan atau evaluasi.
d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Dinas Kehutanan sebagai pimpinan sekaligus pengambil keputusan dalam tubuh Dinas kehutanan.
b. Kepala bagian Humas sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan kehumasan Dinas kehutanan.

c. Seksi-seksi yang terlibat dalam kegiatan *community relations* dalam mengatasi penebangan liar. Tokoh-tokoh/kelompok-kelompok masyarakat yang mengetahui secara jelas tentang adanya penebangan liar.

d. Masyarakat setempat.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Masing-masing teknik tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya. Adapun teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut *Karl Weick* seperti yang dikutip *Jalaludin Rachmat*, didefinisikan sebagai "pemilihan, pengkodean, pengubahan, dan pencatatan serangaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme *in situ,* sesuai dengan tujuan empiris".[25] Observasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mengamati langsung obyek yang diteliti. Selain itu observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang ada pada obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan penelitian langsung kekantor Dinas Kehutanan dan tempat-tempat di mana terjadi penebangan liar serta melakukan pengamatan terhadap proses dan kegiatan yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[26] Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Kepala bagian humas Dinas Kehutanan, sub-sub bagian lain, kelompok dan tokoh masyarakat, masyarakat setempat serta lembaga lain yang terkait dengan kegiatan Humas Dinas Kehutanan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan *community relations.*

c. Dokumentasi dan studi pustaka

Untuk melengkapi data-datanya, peneliti mengambil pula dokumen-dokumen yang diterbitkan dan yang tersedia di Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sesuai dengan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Yaitu menggunakan teknik berupa: observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi dan studi pustaka untuk mengumpulan data. Pengumpulan data ini diperoleh pada saat penelitian.

b. Reduksi data

Setelah mendapatkan data-data, maka data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah secara seksama kemudian diambil sesuai kebutuhan peneliti. Langkah selanjutnya kemudian melakukan pemilahan, pengkategorian, penyederhanaan dan pemusatan data yang ada di lapangan yang relevan dengan permasalahan penelitian (mereduksi data). Reduksi data ini dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.

c. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah di reduksi dalam bentuk deskriptif naratif.

d. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil pemikiran dengan jalan melakukan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori berdasarkan data yang telah didapat